



Bab V

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

5.1. Visi

Dengan menyelaraskan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan memperhatikan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025 dengan visi “Mewujudkan Masyarakat Maluku Utara yang Damai, Maju, Mandiri, Adil, dan Sejahtera yang berorientasi Sumber Daya Laut dan Kepulauan”, serta mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang, dan dinamika dan isu-isu strategis yang ada, maka visi RPJMD Provinsi Maluku Utara 2014–2019 adalah :

“Maluku Utara CINTA 2019”

Kata CINTA yang terkandung dalam visi ini adalah akronim dari Cerdas, Indah, Nikmat, Taqwa, dan Aman, sebagai tujuan yang ingin dicapai. Adapun makna CINTA berarti cinta kepada negeri Maluku Utara dan rakyatnya dengan sepenuh hati, sehingga menjadi pembangkit energi yang besar untuk membawa Provinsi Maluku Utara mencapai tujuan. Untuk mewujudkan Maluku Utara Cerdas, Indah, Nikmat, Takwa dan Aman 2019, maka dijabarkan visi sebagai berikut:

- Membangun Maluku Utara **Cerdas** mengandung arti mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, amanah dan berdaya saing melalui pendidikan dan kesehatan.
- Membangun Maluku Utara **Indah** mengandung arti mewujudkan keseimbangan dan stabilitas pembangunan melalui distribusi sumberdaya secara adil dan merata.
- Membangun Maluku Utara **Nikmat** mengandung arti mewujudkan pembangunan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar, mendorong pertumbuhan dan perkembangan wilayah serta integrasi wilayah kepulauan.
- Membangun Maluku Utara **Taqwa** mengandung arti mewujudkan kehidupan masyarakat Maluku Utara yang beragama, beradab, berbudaya dan bermartabat.
- Membangun Maluku Utara **Aman** mengandung arti mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang melayani, bersih, dan berwibawa.

5.2. Misi

Untuk mewujudkan visi CINTA, ada 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Membangun Masyarakat Maluku Utara yang memiliki kualitas hidup baik untuk dapat bekerja secara mandiri (**Misi Cerdas**).



2. Mendorong pertumbuhan, stabilitas dan pendistribusian pembangunan ekonomi secara adil dan merata serta peningkatan nilai tambah produksi melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan **(Misi Indah)**.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk menunjang pengembangan ekonomi wilayah **(Misi Nikmat)**.
4. Membangun kehidupan beragama dan berbudaya yang menjadi inspirasi bagi kebangkitan seluruh sektor kehidupan masyarakat Maluku Utara **(Misi Taqwa)**.
5. Memperbaiki tatakelola pemerintahan Maluku Utara untuk mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan berwibawa **(Misi Aman)**.

5.3. Moto/Slogan Pembangunan

Moto/Slogan:

"Dari Laut Membangun Maluku Utara"

Ide dari moto/slogan ini muncul sebagai jawaban atas berbagai permasalahan mendasar yang dialami masyarakat kepulauan atau provinsi kepulauan dimana laut tidak menjadi pemisah namun menjadi penghubung antarwilayah. Oleh karena itu, dituntut keberpihakan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

Keunggulan geostrategi wilayah Indonesia telah mendapat pengakuan secara internasional sejak tahun 1982 ketika Indonesia diakui sebagai salah satu Negara kepulauan dalam *United Nations Convention of Law of Sea II* (DewanKelautan Indonesia, 2010). Dengan pengakuan tersebut Indonesia harus pula mematuhi semua ketentuan yang tercantum di dalamnya. Ada tiga rezim dari konvensi tersebut yang harus diakomodasi, yaitu lintas damai (*innocent passage*), lintas transit (*transit passage*), dan lintas alur laut kepulauan (*archipelagic sea lane*). Namun dengan pengakuan ini, wilayah kedaulatan Indonesia bertambah, karena semua wilayah laut dalam kepulauan Indonesia menjadi wilayah teritorial, dan tidak ada lagi wilayah internasional seperti sebelumnya, kecuali tiga rezim di atas yang harus dipatuhi.

Untuk mengakomodasi ketentuan di atas, Indonesia menyediakan tiga alur laut, yaitu Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): ALKI I dari Laut Cina Selatan ke Samudera Hindia lewat Selat Sunda, ALKI II dari Laut Sulawesi ke Samudera Hindia Selatan Nusa Tenggara lewat Selat Makassar dan Selat Lombok, dan ALKI III dari Samudera Pasifik ke Laut Timor atau Laut Aru. Ketiga ALKI itu menjadi perlintasan dari utara keselatan atau sebaliknya, dari Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, Laut Pasifik ke Samudera Hindia sebelah selatan Jawa-NusaTenggara dan Laut Aru.

Moto/slogan ini didasari oleh beberapa alasan sebagai berikut:

1. Posisi geostrategis Provinsi Maluku Utara yang berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI III), pada titik terluar berbatasan dengan Samudera Pasifik dan merupakan pusat dari segitiga terumbu karang dunia (*coral triangle*) yang memanjang dari Filipina bagian utara, barat hingga Borneo, Bali hingga ke timur kepulauan Solomon;
2. Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan dengan sebaran pulau mencapai 805 buah pulau dan



- terdapat 82 pulau yang dihuni dan 723 pulau yang tidak dihuni, dengan luas wilayah lautan 114.288,94 Km² (78,39%) dari luas wilayah 145.801,10 Km², panjang garis pantai \pm 6.644 Km memiliki tingkat kepadatan dengan sebaranyang tidak merata, dengan pola hunian penduduk yang mencapai 93 persen berada di pesisir pantai, memiliki hambatan dalam aspek rentang kendali pemerintahan dan pelayanan masyarakat sehingga cenderung mengakibatkan ekonomi biaya tinggi;
3. Potensi sumberdaya perikanan, dengan potensi perikanan tangkap sebesar 1.035.230 ton/tahun, dan potensi lestari *maximum sustainable yield* (MSY) sebesar 517.000 ton/tahun. Sampai dengan tahun 2013, tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan baru mencapai 151.541 ton atau baru sekitar 36 persen dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan (80 persendari MSY);
 4. Pengelolaan potensi sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau, antara lain: wisata bahari, tambang, energi dan mineral, dan potensi sumberdaya alam lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat;
 5. Keterbatasan infrastruktur masih menjadi penghalang konektifitas antar wilayah, pulau dan antar gugus pulau yang berdampak pada keterlambatan pergerakan orang, barang dan jasa dan pergerakan ekonomi wilayah;
 6. Pesisir, laut, dan pulau-pulau mempunyai potensi yang besar akan tetapi belum menjadi daya ungkit dan daya bangkit ekonomi wilayah Maluku Utara;
 7. Gugusan pulau-pulau (Halmahera, Morotai, Ternate-Tidore, Bacan, Obi, Taliabu, Mangolidan Sula) di Provinsi Maluku Utara, di mana pulau Halmahera dijuluki sebagai "raksasa yang sedang tidur" (*sleeping giant*) belum dikembangkan secara optimal sebagai magnet pertumbuhan ekonomi wilayah.

Pengembangan wilayah Provinsi Maluku Utara dilakukan dengan pendekatan 'Gugus Pulau' dan 'Laut Pulau' dengan pembagian berdasarkan kesamaan ekosistem, sosial budaya (kependudukan), transportasi, potensi sumberdaya alam dan perekonomian. Pendekatan 'Gugus Pulau' didasarkan pada aspek-aspek yang terkait meliputi pola pengelompokan ruang, kondisi unsur fisik wilayah (kawasan lindung dan kawasan budidaya), jaringan transportasi, sistem pusat-pusat permukiman, serta interaksi antar wilayah dan sub wilayah (konektifitas). Sedangkan, pendekatan 'Laut Pulau' yaitu memadukan laut dan pulau-pulau. Laut dianggap sebagai wilayah potensial, untuk dapat dibudidayakan sebagai kawasan produksi. Kawasan 'Laut Pulau' dicirikan oleh adanya simpul pertumbuhan antar pulau yang terpisah oleh laut dengan berbagai potensi yang terdapat didalamnya. Pendekatan ini digunakan dengan maksud mengoptimalkan pengembangan wilayah-wilayah di Provinsi Maluku Utara. Pendekatan 'Gugus Pulau' dan 'Laut Pulau' ini sangat efektif untuk dilakukan dalam strategi pengembangan wilayah Provinsi Maluku Utara dan diharapkan dapat mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah.

Sumber daya pesisir berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah dan nasional untuk meningkatkan penerimaan devisa, lapangan kerja, dan pendapatan penduduk. Sumber daya pesisir tersebut mempunyai keunggulan komparatif karena tersedia dalam jumlah yang besar dan beranekaragam serta dapat dimanfaatkan dengan biaya eksploitasi yang relative murah sehingga mampu menciptakan kapasitas penawaran yang kompetitif. Provinsi Maluku Utara didominasi oleh wilayah pesisir yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil, yang dikelilingi ekosistem pesisir tropis, seperti hutan bakau (*mangrove*), terumbu karang, padang lamun, serta sumber daya hayati, non-hayati, dan plasma nutfah yang terkandung didalamnya.

- Berdasarkan alasan diatas, makamoto/slogan "Dari Laut Membangun Maluku Utara" dipandang relevan bagi pembangunan lima tahun kedepan.



5.4. Gebrakan CINTA Gosale Puncak

Gebrakan CINTA Gosale Puncak merupakan agenda pembangunan strategis untuk mewujudkan visi CINTA, yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) gebrakan, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan), melalui :
 - Bantuan Operasional (BOP) bagi Perguruan Tinggi, peningkatan kualifikasi guru, dosen dan aparatur ke jenjang pendidikan S1, S2 dan S3;
 - Bantuan beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi;
 - Kerjasama penelitian dan pengembangan dengan perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya;
 - Penambahan dan peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan, keperawatan dan dokter/dokter spesialis;
 - Percepatan pembangunan Rumah Sakit Umum Sofifi.
2. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan melalui:
 - Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan kelembagaan di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau;
 - Pengadaan sarana prasarana perikanan tangkap 10 - 30 GT dan >30 GT;
 - Memfasilitasi pembangunan infrastruktur industri pengolahan potensi kelautan dan perikanan (Pabrik pengalengan ikan, *coldstorage*, pembangkit listrik, dermaga pendaratan, galangan kapal, tempat pelelangan ikan);
 - Peningkatan promosi potensi daerah, kerjasama investasi serta perluasan akses pemasaran melalui kerjasama antar daerah dan negara;
 - Pengembangan sarana prasarana destinasi pariwisata;
 - Ekstensifikasi/intensifikasi areal pertanian dan penataan jaringan irigasi yang mendukung swasembada pangan dan membentuk kawasan *hinterland* sebagai penyangga (lumbung pangan) bagi pulau Ternate pulau Tidore, Sofifi, dan wilayah sekitarnya;
 - Perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan pendapatan masyarakat;
3. Percepatan pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang melalui:
 - Pembangunan jalan dan jembatan jalan lingkar (*ring road*) Halmahera, kawasan strategis, sentra produksi, dan simpul penyeberangan antar pulau;
 - Penambahan armada dan frekuensi perjalanan sarana transportasi laut;
 - Peningkatan rasio elektrifikasi atau desa teraliri listrik dan pengembangan energi baru terbarukan seperti pembangunan pembangkit listrik dan pemasangan PLTS;
 - Percepatan pembangunan rumah dinas pejabat eselon II, rumah dinas PNS, rumah dinas bagi anggota DPRD Provinsi di Sofifi, serta pengembangan perumahan tidak layak huni bagi masyarakat berpendapatan rendah;
 - Fasilitasi pengembangan sarana prasarana informasi dan telekomunikasi di seluruh wilayah;



- Fasilitas pengembangan bandara Leo Wattimena Morotai sebagai persiapan bandara embarkasi haji;
 - Percepatan pengembangan bandara Kuabang Kao sebagai Bandara Utama;
 - Percepatan pembangunan sanitasi permukiman dan air minum layak;
 - Percepatan pembangunan terminal Type B Kota Sofifi dan pembebasan lahan; dan
 - Peningkatan pengawasan, pengendalian lingkungan hidup dan rehabilitasi hutan, lahan dan daerah aliran sungai (DAS) dan Normalisasi/Penataan Danau Galela.
4. Membangun kehidupan beragama dan berbudaya, melalui:
- Fasilitas pengiriman tenaga-tenaga pembina keagamaan dan bantuan sarana peribadatan;
 - Pengembangan pemondokan dan pelayanan haji;
 - Pengembangan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan lembaga adat/budaya guna mendukung kelestarian budaya lokal;
 - Pengembangan budaya lokal dan budaya kreatif melalui penyusunan peta jalan (*road map*) pengembangan kebudayaan Maluku Utara yang berbasis dan berorientasi kemajuan;
 - Pembangunan Masjid Raya Provinsi, Gereja Oikoumene, dan Percepatan Pembangunan GOR Sofifi.
5. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, melalui:
- Peningkatan disiplin dan kesejahteraan aparatur;
 - Restrukturisasi dan penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
 - Peningkatan pengawasan pembangunan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan;
 - Penerapan e-Government;
 - Penataan manajemen aparatur;

Pendekatan yang digunakan dalam mewujudkan 33 Gebrakan CINTA Gosale Puncak adalah pendekatan koordinatif lintas-pemerintah daerah, lintas-sektor, serta kerjasama antara pemerintah daerah dengan swasta. Gebrakan ini merupakan bagian dari program dan kegiatan dalam alur skala prioritas.

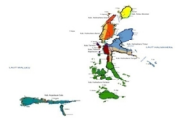
5.5. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka perlu ada kerangka yang jelas terkait tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai sehingga pelaksanaan urusan pemerintahan baik urusan wajib, urusan pilihan dan administrasi pemerintahan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan berjalan terarah. Tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan untuk mencapai visi dan misi. Tujuan dan sasaran dari uraian masing-masing misi pembangunan sebagaimana tabel berikut:



Tabel 5.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Tahun 2014 - 2019

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
VISI : Maluku Utara CINTA 2019			
1	Membangun masyarakat Maluku Utara yang berkualitas dan mandiri (Misi Cerdas)	Meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana pendidikan.	Meningkatnyakualitas SDM
			Bertambahnya sarana dan prasarana di semua jenjang dan jenis pendidikan
		Mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, mandiri dan berkeadilan
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan yang mendukung pelayanan kesehatan di kabupaten/kota.
2	Mendorong pertumbuhan, stabilitas dan pendistribusian pembangunan ekonomi secara adil dan merata serta peningkatan nilai tambah produksi melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan (Misi Indah);	Memperluas kegiatan usaha barang dan jasa secara efisien serta mewujudkan swasembada pangan dan industri yang berbasis SDA.	Terlaksananya kegiatan usaha barang dan jasa secara efisien serta Terwujudnya industri yang berbasis sumber daya alam;
			Tercapainya usaha pertanian yang mampu mewujudkan swasembada pangan;
		Meningkatkan penghasilan masyarakat dan lapangan kerja.	Terwujudnya kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses sumber pendanaan dan pasar.
			Meningkatnya lapangan kerja yang berpihak pada tenaga kerja lokal dan membaiknya pendapatan per kapita.
3	Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk menunjang pengembangan ekonomi wilayah (Misi Nikmat);	Meningkatkan pelayanan sistem jaringan jalan.	Terlaksananya pengembangan jaringan jalan yang menjangkau Kawasan Strategis Provinsi (KSP)
		Meningkatkan konservasi dan pemanfaatan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air	Terlaksananya pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana SDA
			Terlindunginya wilayah permukiman dari daya rusak air
		Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi	Mewujudkan sistem transportasi wilayah
		Meningkatkan sarana dan prasarana perkotaan danperdesaan	Meningkatnya pelayanan air minum dan akses terhadap sanitasi layak
		Melaksanakan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan pemukiman



		Meningkatkan layanan listrik dan telekomunikasi	Meningkatnya ljangkauan ayanan Listrik; Meningkatnya layanan telekomunikasi;
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Optimalisasi fungsi perencanaan dan pengendalian penataan ruang;
		Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat yang religius serta meningkatkan kepedulian sosial	Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang religius;
			Meningkatnya kehidupan dan kepedulian sosial; Terwujudnya kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadah dan meningkatkan peran serta fungsi lembaga keagamaan;
4	Membangun kehidupan beragamaan berbudaya yang menjadi inspirasi bagi kebangkitan di seluruh sektor kehidupan masyarakat Maluku Utara (Misi Taqwa);	Mengembangkan seni dan budaya	Terwujudnya seni dan budaya yang religius, tangguh, disiplin, kuat, inovatif dan kreatif.
5	Memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan berwibawa (Misi Aman).	Menciptakan organisasi yang menjalankan fungsi pelayanan, profesional, berdaya guna, produktif, aspiratif, partisipatif, terpadu, transparan, dan bebas dari KKN.	Terwujudnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>rightsizing</i>);
			Tersedianya <i>e-Data base</i> pada SKPD yang berbasis geospasial
			Meningkatnya sistem prosedur dan tata kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> ;
		Mewujudkan pelayanan publik yang prima	Meningkatnya aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.
			Meningkatnya pelayanan prima yang berorientasi pada masyarakat dan dunia usaha;
		Meningkatkan sinergitas dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.	Terwujudnya sinergitas dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
		Meningkatkan kapasitas, akuntabilitas dan kinerja birokrasi.	Meningkatnya kapasitas, akuntabilitas dan kinerja birokrasi.